



TATA KELOLA DATA SEKTORAL DAN INDIKATOR EPSS

Disampaikan pada kegiatan Forum Data OPD Provinsi NTB



I Gusti Lanang Putra
Kepala Bagian Umum
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat



02 Februari 2023

KERANGKA PAPARAN



Photo by Adeolu Eletu on Unsplash

1

Tata Kelola Penyediaan Data Statistik

2

Mengenal Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

3

Hasil Sementara Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)



1

TATA KELOLA PENYEDIAAN DATA STATISTIK



Dasar Hukum Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik

Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional

Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional

Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral

PENTINGNYA STATISTIK DALAM PEMBANGUNAN



PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sebagai **dasar informasi** dalam penyusunan rencana **kebijakan** pembangunan

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Sebagai **panduan dalam pelaksanaan pembangunan** yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Sebagai **panduan dalam penentuan batasan-batasan** untuk menjamin ketercapaian pembangunan

EVALUASI PEMBANGUNAN

Sebagai **acuan dalam pengukuran efektivitas dan dampak** dari pencapaian pembangunan



Siklus Pembangunan
sesuai dengan Perpres No. 39/2019
tentang Satu Data Indonesia



LATAR BELAKANG



SDI

Penguatan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pemerintah.

Prinsip SDI

Standar Data

Meta Data

Interoperabilitas

Kode Referensi

Pembentukan Kelembagaan

Dewan Pengarah (Pusat)

Forum SDI

Pembina Data

Walidata

Walidata Pendukung (Provinsi, Kab./Kota)

Produsen Data

Perpres, Permen

Perpres, Kepmen, Perda

Perpres, Permen, Peraturan Badan

Permen, Perda

Perda

Perda

Penyelenggaraan SDI

Perencanaan

Pengumpulan

Pemeriksaan

Penyebarluasan

Penggunaan Data

Perencanaan

Pemantauan

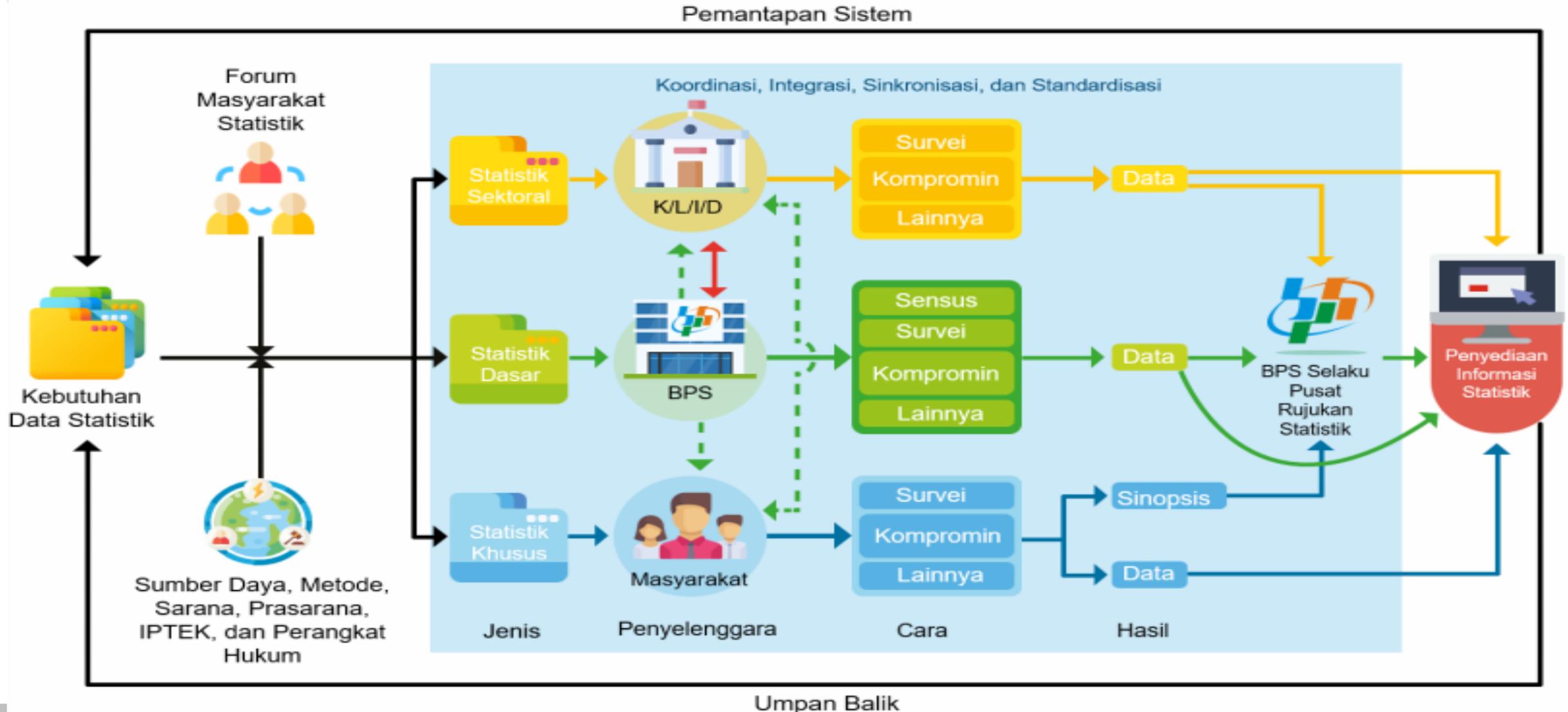
Pengendalian

Evaluasi Pembangunan



SSN

adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.



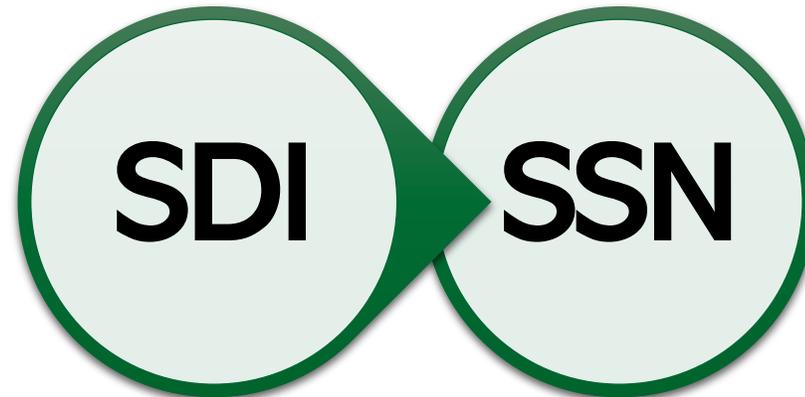


Kaitan SDI dan SSN

Salah satu tujuan pengaturan Satu Data Indonesia adalah:

“mendukung **Sistem Statistik Nasional** sesuai peraturan perundang-undangan”

(Pasal 2 Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019)



Tantangan Penyediaan Data Statistik



Data statistik semakin penting dan berdampak luas



Kebutuhan pengguna akan data statistik semakin beragam



Tuntutan penyediaan data statistik yang semakin cepat



Sumber data alternative yang tersedia semakin banyak: *big data* dan data administrasi

Kondisi dirupsi dan pandemi COVID19 di seluruh dunia



Perubahan masyarakat dan kemajuan teknologi: tuntutan modernisasi **proses bisnis statistik**



Tuntutan penggunaan **anggaran** belanja negara agar semakin efisien



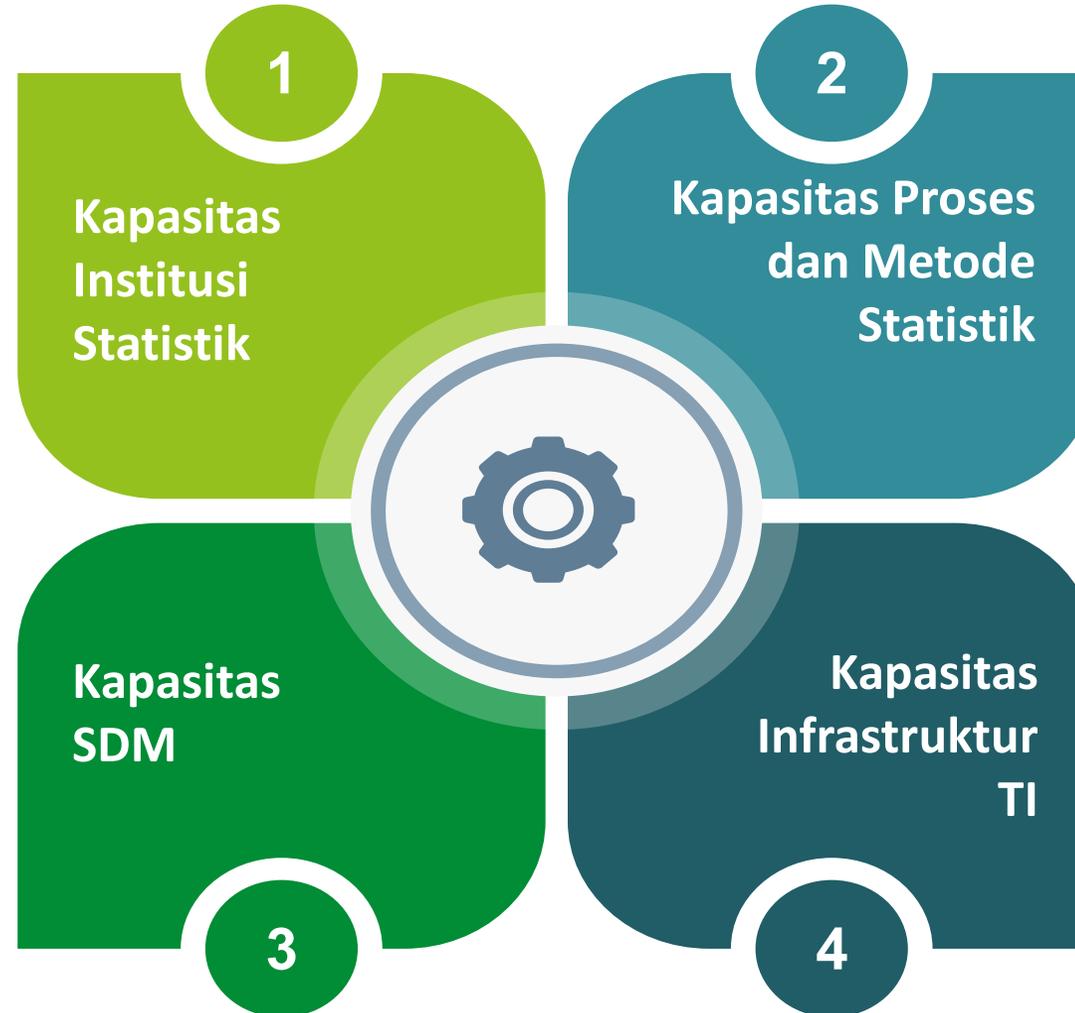
Tuntutan **koordinasi dan kolaborasi** antar penyelenggara kegiatan statistik yang lebih efisien



PENINGKATAN KAPASITAS STATISTIK



- Penetapan unit kerja/fungsi yang menangani statistik
- Penyediaan sumber daya yang memadai dalam penyelenggaraan statistik
- Penerapan tata kelola data yang terintegrasi



- Penerapan proses bisnis statistik yang berstandar -> GSBPM
- Integrasi kegiatan statistik

- Penyelenggaraan diklat teknis statistik
- Peningkatan kualitas dan kuantitas fungsional statistisi
- Pembinaan statistik
- Penyiapan SDM Statistik melalui Politeknik statistik STIS

- Dukungan infrastruktur TI terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik





3



MENGENAL INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)

LATAR BELAKANG

RB

Pencapaian sasaran RBNasional “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” melalui pembangunan data pemerintah untuk digunakan dalam penyusunan kebijakan berbasis data/fakta.

REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL

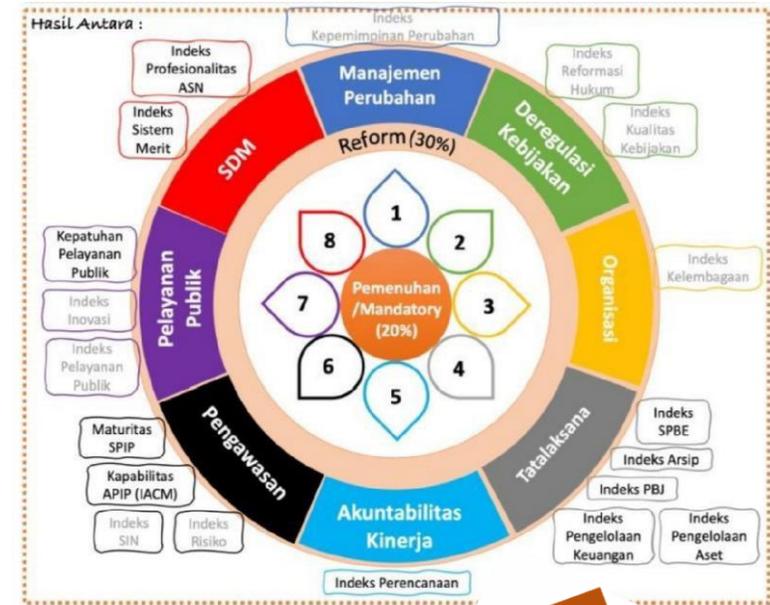
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH:

1. BIROKRASI YANG KAPABEL
2. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
3. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

- MANAJEMEN PERUBAHAN
- DEREGULASI KEBIJAKAN
- PENATAAN ORGANISASI
- PENATAAN TATA LAKSANA
- PENATAAN SDM APARATUR
- PENGUATAN AKUNTABILITAS
- PENGUATAN PENGAWASAN
- PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

AREA PERUBAHAN

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Penyelenggaraan Statistik Sektoral

* Indeks Pembangunan Statistik



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien diperlukan penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral, perlu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan instansi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral



TUJUAN EPSS

1

Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah

2

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah

3

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah





Pengukuran Kinerja Pembangunan Data / Statistik

Diperlukan suatu alat ukur kinerja pembangunan data sebagai bagian **Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral**



Indeks Pembangunan Statistik



IPS adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja institusi pemerintah (KLDI) dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang mencakup 5 domain utama yaitu, **Prinsip SDI; Kualitas Data; Proses Bisnis Statistik; Kelembagaan; dan Sistem Statistik**



Dari hasil pengukuran dapat diperoleh nilai Indeks Nasional dan nilai Indeks diklasifikasikan menurut institusi per Kementerian dan Lembaga serta nilai Indeks menurut Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.





KONSEP MODEL TINGKAT KEMATANGAN

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan **peningkatan kualitas secara berkesinambungan** berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan **reviu dan evaluasi** pada setiap proses

Proses penyelenggaraan statistik sektoral **telah diharmonisasi** dan kemudian ditetapkan **sebuah standar/pedoman** oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk **seluruh unit kerja** dalam organisasi

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan **standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri**

Proses penyelenggaraan statistik sektoral **belum dilakukan oleh seluruh unit kerja**



HIRARKI DOMAIN , ASPEK, INDIKATOR

DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Penerapan Standar Data Statistik (SDS)		Penerapan Metadata Statistik			Penerapan Interoperabilitas Data			Penerapan Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data terhadap Pengguna	Proses Identifikasi Kebutuhan Data	Penilaian Akurasi Data	Penjaminan Aktualitas Data	Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	Akses Media Penyebarluasan Data	Penyediaan Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan Statistik	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data		Pengolahan Data	Analisis Data	Diseminasi Data		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	Penjaminan Netralitas dan Objektivitas thd Penggunaan Sumber Data dan Metodologi	Penjaminan Kualitas Data	Penjaminan Konfidensialitas Data	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Statistik	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data	Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik			Penguatan SSN Berkelanjutan			
	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monev, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monev, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik			Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data	





Tujuan Indeks Pembangunan Statistik

Mengukur **capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral** di K/L/Pemda

Sebagai **dasar** untuk melakukan **pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan** SDI dan data statistik di K/L/Pemda

Mendapatkan satu **ukuran terpenuhinya prasyarat penyelenggaraan** SDI dan statistik

Digunakan untuk menyusun **strategi pembinaan** data statistik



An aerial photograph of a coastal area, likely in West Nusa Tenggara, showing terraced agricultural fields in shades of green and brown, interspersed with numerous palm trees. The terrain is hilly and the fields are arranged in a stepped pattern. A small building is visible in the lower right quadrant.

3

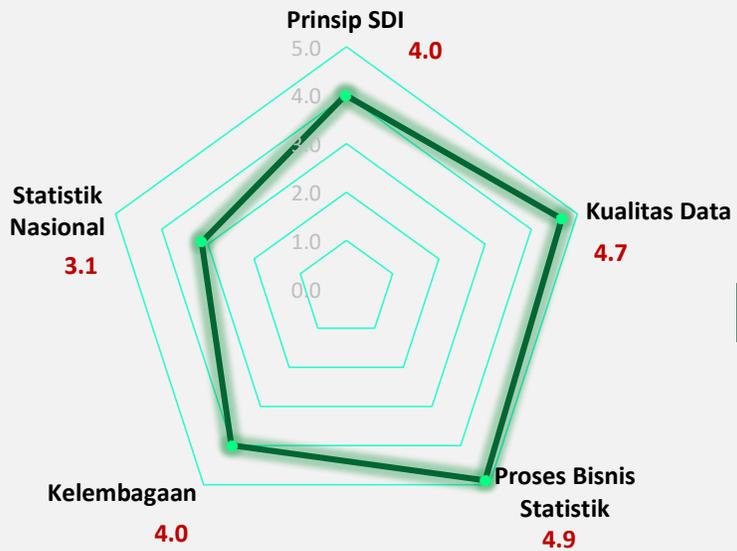


HASIL SEMENTARA EPSS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



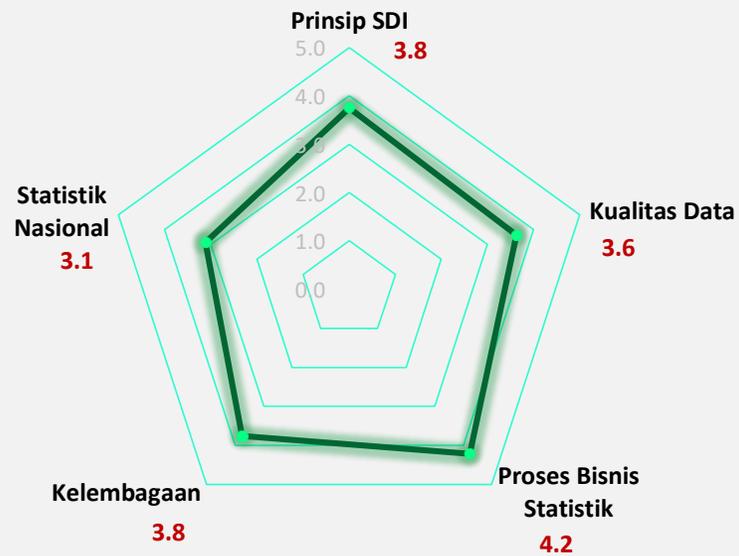
HASIL SEMENTARA EPSS MENURUT TAHAPAN PENILAIAN

TPI



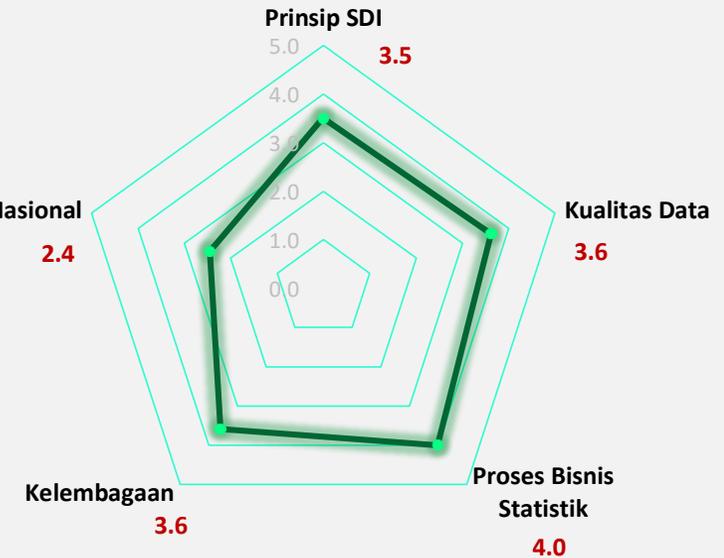
4,23

TPB



3,73

PK

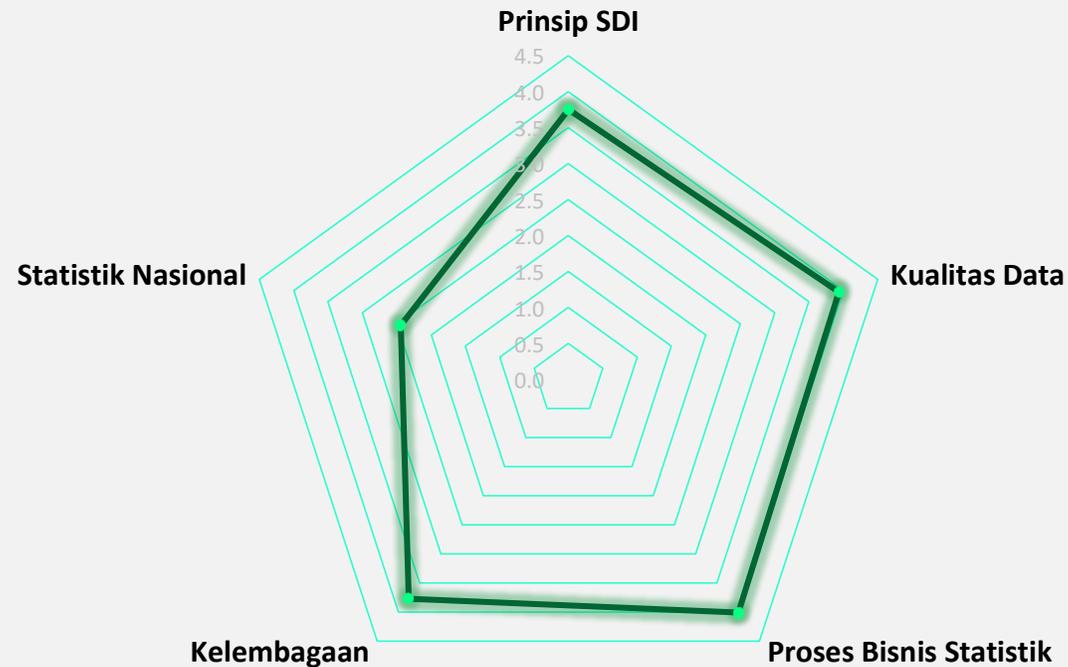


3,51



HASIL SEMENTARA EPSS MENURUT TAHAPAN PENILAIAN

INTERVIEW



3,69



???

**MENUNGGU
TAHAPAN
BERIKUTNYA**



SARAN DAN MASUKAN HASIL INTERVIEW EPSS

1

Melakukan reviu berkala setiap kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral baik dari segi pemasukan data, kualitas data dan diseminasi data

2

Pemanfaatan sumber data alternatif baru yaitu *Big Data*

3

Menetapkan Senarai Rencana Terbit/*Advanced Release Calendar (ARC) Data* pada portal NTB Satu Data





Contoh ARC data pada Portal BPS

ARC Publikasi BPS

ARC BRS

Senarai Rencana Terbit Publikasi BPS 2023

Bulan Rilis :

Kata Kunci :

Menampilkan 1-10 dari 39 hasil

No.	Judul	Periode Terbit	Bahasa	Jadwal Rilis	Status
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2023	Tahunan	Indonesia dan Inggris	28 Feb 2023	Belum Rilis
2	Indeks Harga Konsumen Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022	Tahunan	Indonesia	31 Mar 2023	Belum Rilis
3	Indikator Strategis Statistik Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018-2022	Tahunan	Indonesia	31 Mar 2023	Belum Rilis
4	Nilai Tukar Petani Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022	Tahunan	Indonesia	31 Mar 2023	Belum Rilis
5	Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Lapangan Usaha 2018-2022	Tahunan	Indonesia dan Inggris	5 Apr 2023	Belum Rilis
6	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran 2018-2022	Tahunan	Indonesia	5 Apr 2023	Belum Rilis
7	Statistik Transportasi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022	Tahunan	Indonesia	10 Apr 2023	Belum Rilis
8	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022	Tahunan	Indonesia	28 Apr 2023	Belum Rilis



Perkembangan Mingguan Harga Eceran Beberapa

Nomor Katalog : 7104001.52

Nomor Publikasi : 52000.2256

ISSN / ISBN : -

UNDUH

PUBLIKASI

Tanggal Rilis : 2022-12-30

Ukuran File : 2.83 MB

Publikasi Perkembangan Mingguan Harga Eceran Beberapa Publikasi Perdana yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat setiap bulan tahun 2021. Publikasi ini direncanakan merupakan

Merupakan suatu kewajiban produsen data kepastian rilis data kepada konsumen data dalam bentuk Senarai Rencana Terbit data yang di pampang pada Portal Data (NTB Satu Data)



PENUTUP



*“Diperlukan **Koordinasi dan Kolaborasi Bersama** dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia guna Menghasilkan Data Statistik yang Berkualitas”*





Terima Kasih!

<https://data.ntbprov.go.id> | <https://ntb.bps.go.id>